

# BANGKITNYA KEMBALI KE-SUKUBANGSAAN DALAM MASYARAKAT INDONESIA

S. Budisantoso\*

*Masyarakat Indonesia dewasa ini sedang menghadapi pergolakan sosial berbau SARA yang merata hampir di seluruh penjuru tanah air. Nampaknya gejolak sosial itu sangat erat kaitannya dengan tekanan yang timbul karena perubahan lingkungan yang sangat kuat. Perubahan lingkungan itu tidak terbatas pada lingkungan alam melainkan juga pada lingkungan sosial yang pada gilirannya menuntut segenap penduduk di kepulauan Nusantara untuk, tiada kecualinya, menyesuaikan diri kembali secara perorangan (adjustment) maupun secara kolektif (adaptation) dalam mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat.*

Perubahan lingkungan itu sangat erat kaitannya dengan penerapan teknologi modern selama 30 tahun pembangunan nasional yang cenderung eksploitatif dan ekspansif dalam mengolah sumberdaya untuk mengejar keuntungan materi. Pengelolaan lingkungan dan pengurusan sumberdaya alam yang tidak terkendali, maupun maupun meningkatnya intensitas pengaruh ekonomi pasar, telah mempercepat perubahan lingkungan dan tatanan hidup bermasyarakat pada umumnya.

Bukan hanya menyusutnya persediaan sumberdaya maupun mutu lingkungan yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia dewasa ini, melainkan juga hancurnya berbagai pranata sosial sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan hidup.

Sesungguhnya dampak tekanan lingkungan itu tidak terbatas pada kehidupan ekonomi yang dilanda krisis, melainkan meluas hampir ke seluruh sektor kehidupan sosial, politik dan kebudayaan masyarakat pada

---

\* S. Budhisantoso, *Puslit Pranata Pembangunan Universitas Indonesia*

umumnya. Salah satu gejala sosial yang menonjol dalam suasana krisis itu adalah keberingasan sosial yang melanda hampir ke seluruh penjuru tanah air. Penjambretan dan pencurian yang disertai kekerasan sampai pada perampokan dan penjarahan secara terbuka yang disertai dengan korban jiwa, telah menjadi bahan berita yang memenuhi media massa. Belum lagi perkelahan antarpelajar dan antarkelempok yang menggunakan senjata tajam ataupun peledak yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda.

Sementara itu banyak perkara yang menginjak-injak rasa keadilan dan menghancurkan harapan masyarakat akan kepastian usaha dan hari depan yang lebih baik. Keadaan itu telah menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Biasanya perubahan lingkungan yang berlangsung cepat dan melanda hampir seluruh sektor kehidupan itu menyebabkan hanya sebagian kecil masyarakat yang cukup peka untuk bekerja keras dan berhasil menyesuaikan diri secara menguntungkan. Sementara itu sebagian besar penduduk cenderung untuk melarikan diri dari kenyataan dan sibuk dengan berbagai kegiatan sosial-budaya maupun spiritual yang diyakini akan dapat mengembalikan kejayaan masa lampau secara gaib

(*messianic movement*). Sedang si-sanya cenderung untuk melakukan perlawanan terhadap perubahan disertai dengan keberingasan.

Dalam suasana sedemikian itu, masyarakat luas seolah-olah telah kehilangan daya tangkal dan mereka cenderung mengabaikan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku sehingga dengan mudah terseret untuk ikut melakukan keberingasan dalam menggapai tantangan hidup. Dengan berbagai alasan yang sederhana sekalipun, masyarakat tergerak untuk berunjukrasa secara damai maupun dengan disertai keberingasan. Demikian pula aparat keamanan dan pemerintahan seolah-olah kehabisan akal sehat dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang semakin kompleks dan sulit ditanggulangi. Berbagai cara untuk mengatasi dilakukan oleh aparat pemerintahan dan keamanan, seperti penekanan fisik maupun psikologis sampai pada penggunaan kekerasan dan penganiayaan serta pengerahan penembak misterius maupun penculikan yang sulit dipertanggungjawabkan secara manusiawi.

Sementara itu untuk membersihkan diri dari kegagalan, aparat pemerintahan maupun keamanan dengan mudahnya

menuduh provokator sebagai kambing hitam, sekalipun mereka itu tidak pernah tertangkap apalagi diadili secara terbuka. Kecenderungan mencari kambing hitam yang tidak kunjung tertangkap itu justru memicu tindak kekerasan massal semakin marak karena hilangnya kepercayaan mereka terhadap aparat yang berwenang. Akibatnya gejala kelumpuhan sosial (*social entropy*) itu telah menghidupkan kembali hukum rimba atau *the survival of the fittest*. Siapa yang ingin selamat harus berjaga-jaga ataupun mempersenjatai diri secara perorangan ataupun kolektif guna melibas setiap bentuk ancaman secara fisik. Bagi mereka yang mampu membayar tukang pukul ataupun pengawal bersenjata, dapat memperoleh perlindungan profesional di rumah ataupun selama perjalanan. Bagi orang kebanyakan yang kurang mampu terpaksa mengembangkan kesetiakawanan sosial, dalam berbagai bentuk pengamanan swakarsa yang justru pada mulanya diprakarsai oleh aparat keamanan sendiri.

Akan tetapi nampaknya kekecewaan masyarakat tidak terbatas pada kegagalan aparat pemerintahan maupun keamanan memenuhi kebutuhan akan rasa aman semata, melainkan juga mengusik rasa keadilan mereka. Keadaan inilah yang rupa-ru-

panya menjadi alasan berlanjutnya keresahan sosial, yang dengan mudah dimanfaatkan oleh para petualang sosial, ekonomi dan politik. Dengan mudah masyarakat digerakkan oleh para petualang untuk beraimai-ramai berunjukrasa guna melampiaskan kekecewaan atau sekedar mematahkan kejenuhan hidup tanpa kepastian. Pengerahan massa dalam masyarakat majemuk itu semakin mudah dengan membangkitkan kesadaran akan komunitas (*peoplehood* atau kesukubangsaan (*ethnicity*)) sebagaimana terjadi di Indonesia dewasa ini.

### **Bangkitnya Kesukubangsaan (*Ethnicity*)**

Sesungguhnya meningkatnya gerakan sosial yang diwarnai sentimen kedaerahan, kesukuan, kegamaan ataupun rasial pada akhir-akhir ini tidak bebas dari pengaruh perubahan lingkungan yang mengganggu rasa aman, rasa keadilan dan kepastian akan hari depan yang lebih baik bagi masyarakat luas. Benih-benih gerakan sosial yang diwarnai oleh kesadaran akan kesukubangsaan itu sesungguhnya sudah mulai berkembang ketika pemerintah Orde Baru meningkatkan program pembangunan yang menuntut terlalu banyak pengorbanan dari

masyarakat luas dan sebaliknya lebih banyak memberi keuntungan maupun peluang pada golongan kecil elit yang dekat dengan pusat kekuasaan. Akan tetapi tekanan lingkungan pada waktu itu masih dapat diatasi dengan berbagai cara yang bersifat manipulatif. Bukan hanya masyarakat kebanyakan harus memperkecil konsumsi kalori (*minimum calorie consumption*) sebagaimana tradisi masyarakat petani dalam menghadapi masa susah, akan tetapi mereka juga dapat menghibur diri dengan berbagai cara yang memperlunak penderitaan. Penggunaan kata-kata yang diperhalus untuk mengungkapkan penderitaan dan tekanan yang sama, merupakan bukti kelenturan masyarakat agraris menahan derita. Akan tetapi ketahanan masyarakat itu bukan tidak ada batasnya, dan pada waktunya mereka tidak mampu lagi meredakan perasaan dan meledak dalam berbagai bentuk gerakan sosial yang bersifat damai (*peacefull*), setengah damai (*pseudo peacefull*) dan yang disertai dengan keberingasan (*violent*).

Apa yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa gerakan sosial di Indonesia akhir-akhir ini cenderung berbau kesukubangsaan atau istilah populernya SARA. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan menguatnya kesa-

daran kesukubangsaan dalam masyarakat majemuk seperti halnya di Amerika Serikat. Glazer dan Moynihan (1970) menyatakan bahwa kesadaran kesukubangsaan atau etnisitas itu muncul ketika: Pertama, identitas pekerjaan (*occupational identity*) telah merosot maknanya sebagai sumber kebanggaan diri seseorang dalam masyarakat, Kedua, kehidupan politik dalam negeri yang memicu persaingan antarsukubangsa; Ketiga, agama tidak efektif lagi fungsinya sebagai identitas suatu kelompok sosial. Hal itu dapat dipahami berlakunya dalam masyarakat majemuk yang modern di Amerika Serikat. Identitas pekerjaan dalam masyarakat modern yang besar dan terbuka itu tidak dapat diandalkan lagi fungsinya sebagai sumber kebanggaan diri. Pola-pola hubungan dalam masyarakat modern itu bersifat impersonal dan hubungan antarsesama warga itu biasanya dilandasi oleh barang dan jasa yang dapat dipertukarkan. Di Indonesia, orang masih dapat membanggakan identitas pekerjaan dan bahkan orang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri, walaupun penghasilannya sangat tidak memadai untuk memelihara status sosial yang diembannya. Besarnya kebanggaan atas identitas pekerjaan itu juga tercermin

dalam upaya masyarakat menggunakan istilah karyawan untuk menggantikan buruh atau pekerja di lingkungan swasta.

Akan tetapi kebanggaan akan identitas pekerjaan itu nampaknya tidak banyak gunanya sebagai sarana membina kesetiakawanan sosial dalam memperjuangkan perbaikan nasib mereka. Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan setiap kekuatan sosial yang diperkirakan mempunyai potensi untuk mengganggu stabilitas pembangunan, telah dijinakkan dalam wadah organisasi yang terkendali, sebagaimana yang terjadi pada masa kolonial. Kebijakan sistem monolitik yang hanya membenarkan adanya satu organisasi pekerja yang terkendali (KORPRI), telah menghancurkan identitas pekerjaan sebagai sumber kebanggaan diri bagi anggotanya sebagai himpunan sumberdaya manusia dan bukan sebagai warganegara yang berdaulat.

Faktor politik dalam negeri yang sentralistik dan ditopang dengan birokrasi yang amat kuat di Indonesia, juga telah memicu menguatnya kesadaran akan kesukubangsaan di kalangan masyarakat luas. Ketimpangan penguasaan sumberdaya sampai pada perimbangan keuangan pusat dan daerah, telah membangkitkan kekecewaan ma-

sarakat daerah yang merasa dikuras kekayaan dan sumberdaya mereka untuk kepentingan sejumlah kecil elit dan kaki tangannya di pusat. Belum lagi tertutupnya mobilitas sosialpolitik dan ekonomi elit daerah untuk muncul di arena nasional. Orang masih ingat betapa untuk memperebutkan kursi wakil utusan daerah setelah pemilihan umum yang baru lalu, elit daerah terpaksa menyerah pada orang-orang daerah yang telah lama bermukim dan berhasil mencapai kemapanan dan menguasai berbagai keunggulan sosial, politik maupun ekonomi. Persaingan yang tidak sehat itu telah mendorong elit daerah untuk mengaktifkan kembali simbol-simbol kesukubangsaan guna menggalang kekuatan sosial politik untuk memenangkan perjuangan mereka.

Kesukubangsaan itu juga dapat bangkit kembali ketika agama tidak efektif lagi sebagai simbol identitas seseorang. Hal ini dapat dijelaskan betapa di Amerika Serikat kesadaran akan simbol-simbol kesukubangsaan menguat kembali, karena memang kebebasan beragama benar-benar dijamin tanpa banyak peraturan yang membedakan perlakuan terhadap pemeluk agama yang berbeda. Demikian pula orang bebas untuk memilih jodoh tanpa harus memperhati-

kan latar belakang keagamaan masing-masing. Sesungguhnya di Indonesia pun ada kebebasan beragama, akan tetapi berbagai peraturan menyebabkan orang harus memperhatikan latar belakang masing-masing dalam memilih jodoh untuk mempermudah peresmian perkawinan. Demikian pula ada banyak ketentuan yang mengatur pendidikan agama di sekolah dan bahkan dalam melaksanakan upacara dan ibadah. Sungguhpun di Indonesia masih ada sejumlah sukubangsa yang menggunakan simbol-simbol keagamaan sebagai identitas, seperti suku-sukubangsa Melayu, Banjar maupun Betawi, namun karena sebagian terbesar penduduknya beragama Islam, maka efektivitas simbol keagamaan sebagai simbol identitas seseorang menjadi lemah. Bahkan pertikaian antarsesama penganut agama seringkali terjadi, seperti di Kalimantan Barat, Situbondo, Peka-longan, dan Ciamis. Akibatnya masyarakat cenderung untuk berpaling kembali pada simbol-simbol kesukubangsaan non-agama, seperti yang terjadi di antara orang Ambon melawan pendatang Bugis, Buton dan Makasar, antara orang Daya dan Madura di Kalimantan Barat. Simbol-simbol kedaerahan, adat istiadat, bahasa dan rasial lebih menonjol.

Sementara itu Dasllefsky (1975) menambahkan bahwa kebangkitan kesadaran akan kesukubangsaan itu dapat disebabkan oleh perkembangan masyarakat perkotaan yang besar, terbuka keanggotaannya dan heterogin. Perkembangan masyarakat perkotaan yang dipacu oleh kegiatan yang berkaitan dengan industrialisasi, seringkali menyebabkan orang kesepian di tengah keramaian. Pola-pola hubungan berkembang jauh ke luar lingkungan kerabat atau komunitinya dan dilandasi jasa dan barang yang dapat dipertukarkan. Sementara itu untuk meningkatkan efektivitas interaksi, setiap orang memerlukan identitas yang jelas untuk memperlancar interaksi sosial yang bersifat impersonal. Oleh karena itu ada kecenderungan orang untuk mengaktifkan kembali simbol-simbol kesukubangsaan dalam mengatasi keterasingan dan memperkuat identitas kelompok primordial dalam memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan nyaman hidup di perkotaan. Kesukubangsaan juga dapat menguat kembali karena terjadinya perubahan sosial-budaya secara besar-besaran. Meningkatnya kegiatan ekonomi di Indonesia selama masa pembangunan nasional telah membawa serta nilai-nilai

budaya dan pranata sosial baru yang mendukungnya. Perubahan itu menyebabkan banyak warga masyarakat kehilangan pedoman dalam menghadapi tantangan pembaharuan. Untuk mengatasinya, banyak di antara warga masyarakat yang justru mengaktifkan kembali simbol-simbol kesukubangsaan dalam mencari keselamatan dalam kehangatan dan kenyamanan hidup di tengah pembaharuan sosial budaya. Dashefsky juga menambahkan bahwa pengaruh keberhasilan gerakan emansipatif kaum Hitam di Amerika Serikat, tidak dapat diabaikan, telah memicu berbagai gerakan sosial yang diwarnai oleh kesukubangsaan. Walaupun terbatas, gerakan kaum Hitam Amerika Serikat itu nampaknya juga melanda masyarakat Indonesia yang majemuk. Ketika Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat hendak memasang parabola untuk membuka keterasingan masyarakat di Agats Kabupaten Merauke, diingatkan oleh aparat keamanan setempat untuk menundanya, karena dikhawatirkan pemberitaan tentang maraknya gerakan kaum Hitam di Amerika Serikat dan Afrika pada waktu itu (1980) akan dapat memicu gerakan penduduk setempat untuk menuntut kemerdekaan. Dalam kenyataan terjangkau oleh siar-

an televisi ataupun tidak, kecenderungan masyarakat untuk mengaktifkan simbol-simbol kesukubangsaan dalam menggalang kesetiakawanan antarsesama warga yang merasa berasal dari satu nenek moyang dan memiliki pengalaman sosial budaya yang sama.

Berdasarkan uraian daan rekaman berbagai gerakan sosial, jelaslah bahwa menguatnya kembali kesadaran masyarakat Indonesia akan identitas suku-bangsa mereka itu tidak lepas dari perubahan lingkungan hidup dalam arti luas yang harus mereka hadapi. Pembangunan nasional selama lebih dari 30 tahun, tanpa disadari, telah menimbulkan dampak yang tidak kecil terhadap lingkungan hidup dan pengurusan sumberdaya alam (*natural depletion*) yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Penerapan teknologi modern dalam pembangunan industri itu tidak hanya mempercepat pengurusan sumberdaya alam yang tersedia, melainkan juga menimbulkan dampak sosial budaya masyarakat setempat. Nilai-nilai budaya merkantil, materialistik dan kompetitif yang melandasi pembangunan industri dan peningkatan kegiatan ekonomi pasar menimbulkan reaksi masyarakat yang belum siap untuk menyerapnya (*adoption*). Be-

lum lagi pengaruh organisasi sosial yang dikembangkan dalam dunia usaha yang meluas keluar lingkungan kerabat dan bersifat impersonal yang mengandalkan pada kemampuan kerja seseorang daripada asal-usul keturunan. Kesemuanya itu menambah parah keterbatasan lingkungan (*environmental scarcity*), yang meliputi penyusutan persediaan sumberdaya dan mutu lingkungan hidup alam maupun sosial.

Keterbatasan lingkungan dalam arti luas itu, tidak dapat disangkal, telah merangsang orang untuk memperebutkannya. Semakin langka suatu barang ataupun peluang, di mana pun, semakin keras perjuangan orang untuk memperebutkannya. Hal itu tercermin dalam hilangnya tanah-tanah penggembalaan ternak di perdesaan, sejak jumlah penduduk jauh melampaui ambang batas daya dukung pulau Jawa. Penduduk berlomba-lomba untuk menguasai sumberdaya yang terasa semakin terbatas adanya. Dalam berlomba untuk menguasai sumberdaya dan peluang usaha yang semakin terasa terbatas adanya itu, biasanya hanya mereka yang memiliki berbagai keunggulan teknologi, sosial, politik dan ekonomi yang akan keluar sebagai pemenang.

Tanpa adanya perlindungan

dan peraturan yang adil, sebagian terbesar sumberdaya dan peluang usaha yang terbatas adanya jatuh ke tangan sebagian kecil penduduk yang memiliki berbagai keunggulan itu. Hukum rimba yang memberikan peluang kepada kelompok kecil yang memiliki keunggulan saja (*the survival of the fittest*) itu telah memicu orang kebanyakan untuk mengaktifkan simbol-simbol kesukubangsaan dalam menggalang kesetiakawanan sosial untuk memenangkan persaingan. Tidak jarang bahwa dalam memperebutkan sumberdaya dan peluang yang semakin terbatas adanya itu orang menggunakan kekerasan secara legal maupun tidak legal yang terwujud dalam keberingasan sosial (*violent conflict*) seperti yang berlangsung akhir-akhir ini. Oleh karena itu perlu ditambahkan faktor keterbatasan lingkungan sebagai pemicu kebangkitan kembali kesukubangsaan dalam masyarakat Indonesia dewasa ini.

Berbagai unjukrasa yang diwarnai simbol-simbol kesukubangsaan yang membangkitkan perasaan komunitas adat, ke-daerahan sampai pada keagamaan semakin marak. Demikian pula tuntutan perimbangan keuangan dan otonomi daerah senantiasa mengaktifkan simbol-simbol kesukubangsaan dalam berbagai manifestasinya,

seperti pemilihan gubernur dan penempatan pejabat putra daerah, pengakuan hak penduduk setempat atas sumberdaya yang telah dijual konsesinya. Kesemuanya itu terpulang pada terganggunya rasa aman dan kepastian usaha dalam upaya mewujudkan hari depan yang lebih baik sesuai dengan minat, kebutuhan dan kemampuan penduduk yang bersangkutan. Seandainya rasa aman dan kepastian hidup masyarakat itu terjamin, bangkitnya kembali kesukubangsaan justru memperkuat ketahanan nasional dalam masyarakat majemuk Indonesia yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika.

### **Keadilan Sosial, Demokrasi Politik dan Kebebasan Budaya**

Pada hakikatnya berbagai gerakan sosial baik yang menggunakan cara damai, setengah damai maupun yang disertai kekerasan dengan mengaktifkan simbol-simbol kesukubangsaan itu berawal dari persaingan yang tidakimbang dalam memperebutkan sumberdaya dan peluang usaha di segala sektor kehidupan yang terasa semakin terbatas. Menghadapi persaingan yang tidakimbang tanpa perlindungan hukum yang menjamin rasa aman dan kepastian

usaha itulah masyarakat cenderung untuk melakukan perlawanan secara kolektif. Pada mulanya mereka cenderung menggunakan simbol-simbol agama sebagai identitas kesukubangsaan. Akan tetapi karena sebagian terbesar menggunakan simbol agama yang bersamaan, maka orang mulai mengaktifkan simbol-simbol kesukubangsaan non-agama sebagaimana kini mulai merebak. Di samping itu perkembangan masyarakat perkotaan dan perubahan sosial-budaya yang semakin besar itu akan menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya kembali kesadaran akan kesukubangsaan sebagai identitas diri ataupun kelompok sosial dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu, lebih baik memanfaatkan kesadaran masyarakat akan identitas sukubangsa yang meningkat dalam rangka peningkatan ketahanan nasional daripada berusaha untuk menekannya. Agar kesadaran tersebut menjadikan kekuatan yang positif dalam memperkuat integrasi bangsa, perlu ditegakkan keadilan sosial yang menjamin rasa aman (*social-justice*), pemulihan kedaulatan rakyat (*political democracy*) dan kebebasan masyarakat untuk berkreasi dalam menghadapi tantangan (*cultural freedom*). Ketiga landasan ideal itu diperlukan untuk mengembangkan

pranata sosial dan menata kembali kehidupan masyarakat yang dilanda kelumpuhan sosial selama ini. Dengan demikian Bhineka Tunggal Ika sebagai perwujudan masyarakat majemuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia dapat akan dapat dite-

gakkan tanpa mengorbankan kepentingan kelompok-kelompok sosial yang ikut serta memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dan berhak untuk mengambil bagian dalam pembangunan nasional secara menguntungkan.